Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi (JEBISMA)
Vol. 2 No. 2 Desember 2024 E-ISSN: 3030-9743

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA CV RAHMATIKA MALANG

Pudji Lestari[1]; M. Syafriel[2]; Novy Karmelita Indrawati[3]; Hardi Susilo[4]; Dewi Retnowati[5]
STIE INDOCAKTI MALANG[1,2,3,4,5]
ariayik100266@gmail.com ;msyafriel@yahoo.com; novy.karmelita@gmail.com; hardisusilo2309@gmail.com;dretno443@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui penerapan PPN terhadap penyajian laporan keuangan di salah satu perusahaan di Malang, CV. Rahmatika.

Metode deskriptif kuantitatif digunakan sebagai metodologi dan data digunakan sebagai metode analisis untuk mengevaluasi serta menganalisis pengaplikasian akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) serta mencari penyelesaian atas dampak PPN terhadap pelaporan keuangan di CV.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penerapan PPN pada CV. Rahmatika adalah dengan melakukan offset PPN masukan dari pembelian bahan baku menjadi PPN keluaran dari penjualan produknya yang dikenal dengan metode offset.

Kendala tidak dapat dikompensasikannya PPN masukan menjadi PPN keluaran dicatat berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) di mana bahan baku diperlakukan sebagai harga pokok pembelian, yang berdampak pada berkurangnya laba kotor penjualan. Solusinya adalah dengan menyesuaikan harga jual atau memilih pemasok teridentifikasi sebagai entitas pajak yang membebankan PPN ke pendapatan.

Kata kunci : PPN, Harga Pokok Produksi, Laporan keuangan

PENDAHULUAN

Sektor perekonomian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pajak, hal ini terbukti hampir 80% penerimaan negara berasal dari pajak. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia APBN 2023 mencapai target 112,6% atau Rp2. 774,3 triliun dari penerimaan pajak. Sasaran ini tentu saja dihitung berdasarkan beberapa faktor, antara lain kapasitas perekonomian, iklim investasi, dan daya saing dunia usaha dalam hal basis pajak (Puspasari, t.t.).

Peraturan perundang-undangan pajak penghasilan dan dasar penghitungan pajaknya masih dalam tahap optimalisasi (Rusli & Nainggolan, 2021). Jenis-jenis pajak tersebut antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Purwanto & Handoko, 2022). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada konsumen barang dan jasa. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber pendapatan dan PPN merupakan sumber pendapatan terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh).

PPN merupakan pajak yang diterima apabila dari pembelian Barang Kena Pajak (BKP)/JKP oleh badan usaha dan dibebankan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (2023: 345). Pada

masing-masing pembelian barang yang terkait langsung dengan barangnya, pungutan pajak barang ke pengusaha kena pajak (BKP) termasuk pajak masukan 11 persen dari harga pembelian barang, sehingga barangnya merupakan PPN merupakan pajak keluaran masa pajak yang bersangkutan yakni 11 persen dari sebelum pajak ditambahkan sebagai PPN.

Laporan keuangan dibuat oleh tim agar memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Sehingga, laporan keuangan tidak dibuat dengan khusus untuk satu atau dua pengguna, namun untuk semua pengguna (1) untuk membuat keputusan mengenai apakah perusahaan ditujukan untuk pemilik perusahaan, (2) .) investor, kreditor likuid atau tidak likuid, (3)) pemerintah, yaitu pajak. Akuntansi pajak terdiri dari dua kata yakni akuntansi serta pajak. Akuntansi ialah tahap pencatatan, pengklasifikasian, dan perincian transaksi keuangan yang akan dimuat di laporan keuangan, sementara itu pajak ialah iuran wajib atau pembayaran yang dipungut oleh negara kepada penduduk (wajib pajak).

Oleh karena itu, penanganan pajak pertambahan nilai pada suatu perusahaan mutlak diperlukan untuk menghindari terjadinya penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan di CV Rahmatia (1) (1) mengetahui apakah penerapan akuntansi PPN telah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1983 (tarif PPN sebesar 11%); (2) mengetahui apakah penerapan pelaporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK; dan (3) mengetahui dampak PPN terhadap pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meneliti dengan judul "Analisis penerapan akuntansi PPN dan dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan pada CV. Rahmatika"

TINJAUAN PUSTAKA

1.Pengertian Akuntansi

Akuntansi ialah tahapan menganalisis, mengukur, serta mengkomunikasikan terkait ekonomi dan memungkinkan evaluasi serta keputusan yang jelas dan tepat untuk dibuat oleh mereka yang menerima informasi ini. Sistem ekonomi muncul untuk memenuhi keperluan manusia serta tidak dibatasi dengan barang atau jasa. Sistem seperti ini mengatur, bagaimana kebutuhan yang terbatas didistribusikan di antara orang-orang. 'Siapa yang membutuhkannya?' Proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari para penggunanya. (Harahap, 2012)

2. Pengertian Pajak

Untuk memungut pajak, persetujuan dari rakyat harus diperoleh terlebih dahulu; Pasal 23.2 UUD 1945 menyatakan bahwa semua pajak harus didasarkam undang-undang. Berikut ini adalah pembahasan mengenai definisi perpajakan Dr Rokmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2023:1) menjelaskan pajak ialah iuran rakyat untuk negara berdasarkan didasarkan UU tanpa menerima balasan langsung (kontra prestasi). ditampilkan dan dimaksudkan untuk membayar biaya umum.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang harus dibayar atas konsumsi di daerah pabean (NKRI, termasuk wilayah darat, perairan, ruang udara, dan beberapa negara di dalam zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen tercakup dalam UU pabean), terdiri atas konsumsi barang maupun jasa. PPN memiliki karakteristik dan tujuan sebagai berikut: (a) Pengusaha yang menyediakan barang dikenakan pajak. (b) Pengusaha yang menyediakan Barang Kena Pajak (BKP) di Daerah Pabean dan Jasa Kena Pajak (JKP); (c) BKP tidak berwujud yang dihasilkan di luar Daerah Pabean dan digunakan di Daerah Pabean; (d) JKP yang dihasilkan di luar Daerah Pabean dan digunakan di dalam Daerah Pabean; (e) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Ekspor BKP berwujud atau tak berwujud dan ekspor JKP Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) biasanya termasuk bagian tak terpisahkan dari penerimaan pajak dan PPN dapat membuat dampak yang positif serta besar pada penerimaan pemerintah dan perekonomian Indonesia (Purwanto & Handoko, 2022). Menurut Pasal 7 UU 42/2009, tarif PPN tetap diberlakukan dan direvisi dalam Pasal 7 UU HPP, yang menyesuaikan tarif PPN 11% (sebelas persen) diterapkan pada 1 April 2022: 1. Tarif PPN 11% 2. Tarif PPN 0%. Tarif PPN 0% berlaku dalam hal-hal sebagai berikut (a) ekspor BKP berwujud; (b) ekspor BKP tidak berwujud; (c) ekspor JKP. (c) ekspor JKP. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.Laporan Keuangan

Laporan keuangan ialah wujud untuk memberikan informasi keuangan pada dunia (Kieso, Weygandt dan Warfield, 2019: 4). Laporan keuangan, laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan adalah bagian laporan keuangan. (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2019: 4).

Menurut KESP No. Tujuan tahun 2017, laporan keungan memiliki tujuan yakni agar menyajikan informasi terkait keuangan, kinerja, serta arus kas suatu entitas sehingga pengguna laporan keuangan bisa membantu mereka membuat keputusan ekonomi. Kasmir, pada tahun 2010

METODE PENELITIAN

Data deskriptif kuantitatif akan digunakan di penelitian ini yakni berupa angka, seperti data keuangan perusahaan. Jenis serta data yang akan diolah yakni:Laporan keuangan termasuk data primer dan informasi dari berbagai pihak terlibat termasuk data sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Penerapan Pajak

Menurut informasi dari penulis dari CV Rahmatica, dasar penerapan pajak menjadi awal perhitungan PPN dari BKP mengikuti asal penerapan pajak yang berlaku saat ini. Dasar penerapan pajak yang bisa dikurangi adalah harga jual.

Pajak Pertambahan Nilai

PPN menggantikan pajak konsumsi dengan alasan pajak konsumsi tidak mencukupi kegiatan masyarakat dan tidak meraih tujuan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, mempromosikan ekspor, dan meratakan beban pajak. Pengumpulan dana dari pajak, yang merupakan elemen penting sekaligus penyedia anggaran negara adalah sumber penghasilan yang dominan, serta biaya PPN digunakan oleh pengusaha adalah 11%, sesuai Pasal 42 (7) (i) UU 2009. Daftar biaya produksi untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 yakni:

Tabel 4.1

CV. Rahmatika Laporan Harga Pokok Produksi

2021 2022 dan 2023

(dalam ribuan)

Keterangan	2021		2022		2023	
Pemakaian Bahan Baku						
Persedian Awal	**5.000**		**3.500.**		**6.000.**	

Pembelian	**21.350.**		**23.656.**		**26.063,600**	
Biaya Angkut	**500.**		**850.**		**1.000.**	
Retur Pembelian	**- 2.500**		**- 1.600.**		**- 4.000.**	
Total Pembelian	**19.350.**		**22.906.**		**23.063,600**	
Jml.Persediaan Bersih	**24.350.**		**26.406.**		**29.063,600**	
Persedian Akhir	**- 3.500.**		**- 2.750.**		**- 3.500.**	
Jumlah Pemakaian		**20.850.**		**23.656.**		**25.563,600**
Gaji/Upah Tenaga Kerja Langsung		**5.250.**		**5.250.**		**5.250.**
Biaya Overhead Pabrik						
Gaji Pengawas Produksi	**2.000.**		**2.000.**		**2.000.**	
Biaya Pemeliharaan Mesin	**2.509,244**		**2.509,984**		**3.102,072**	
Biaya Perlengkapan Pabrik	**3.000.**		**4.250.**		**5.000.**	
Biaya Penyusutan Pabrik	**1.750.**		**1.750.**		**1.750.**	
Biaya Penyusutan Mesin Pabrik	**2.000.**		**2.000.**		**2.500.**	
Jumlah Biaya Overhead Pabrik		**11.259,244**		**12.509,984**		**14.352,072**
Jumlah Biaya Produksi		**37.359,244**		**41.415,984**		**45.165,672**
Persedian dalam Proses Awal		**3.500.**		**6.000.**		**4.500.**
Jumlah Barang dalam Proses		**40.859,244**		**47.415,984**		**49.665,672**
Persedian dalam Proses Akhir		**- 2.750.**		**- 3.500.**		**- 1.000.**
Harga Pokok Produksi		**38.109,244**		**43.915,984**		**48.665,672**

Sumber data: diolah

Dari tabel pengolahan diatas, didapatkan harga pokok produksi pada tahun 2021 adalah Rp 38.109,244. selanjutnya 2022 sebesar Rp 43.915,984. dan 2023 sebesar Rp 48.665,672.

Tabel 4.2

CV Rahmatika Laba-Rugi

2021, 2022., 2023

(dlm ribuan)

Keterangan	2021	2022	2023
Penjualan	56.000	66.250.	75.000.
Jasa cetakan	32.515,500	33.724,550	31.910.
Penjualan	27.010.	28.929.	29.750.
HPP	38.109,244	43.915,984	48.665,672
HPP Barang Dagang	16.28,.500	17.846,750	16.462,500
Laba Kotor	61.133.,756	67.140,817	71.531,828
Biaya :			
Biaya Administrasi dan Umum	2.826,150	2.974,938	3.189,422
Biaya Pemasaran	1.300.	1.575.	1.775.
Biaya Bunga	1.167,912	1.454,113	1.769,578
Biaya Gaji	9.000.	9.000.	9.000.
Jumlah Biaya	14.294,062	15.004,050	15.734.
Laba Bersih Sebelum Pajak	46.839,694	52.136,767	55.797,828
PPH Badan	11.709,924	13.034,192	13.949,457
Laba Bersih Setelah Pajak	35.129,771	39.102,575	41.848,371

Sumber data: diolah

Tabel diatas laporan laba-rugi dan laba setelah pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya 2021 sebesar Rp 56.000. dan sebesar Rp 35.129,771 dan 2022 sebesar Rp66.250. dan sebesar39.102,575. dan 2023 sebesar Rp 75.000. dan sebesar Rp. 41.848.371. Rasio laba rugi CV. Rahmatika memiliki biaya produksi dan biaya produksi barang, kali ini penulis hanya berfokus pada biaya produksi saja.

Tabel 4.3

CV Rahmatika Neraca

2021, 2022 , 2023

(dlm ribuan)

Keterangan	2021	2022	2023
Aktiva			

Aktiva Lancar			
Kas	**30.290,225**	**33.993,610**	**37.924,142**
Bank	**38.511,249**	**43.682,845**	**47.710,810**
Piutang	**18.975,063**	**24.907,250**	**26.299,896**
Persediaan	**48.701,790**	**73.249,500**	**75.600,608**
Jumlah Aktiva Lancar	**136.478,327**	**175.833,205**	**187.535,455**
Aktiva Tetap			
Tanah	**50.000.**	**50.000.**	**50.000.**
Gedung	**47.500.**	**47.500.**	**47.500.**
Mesin	**16.000.**	**16.000.**	**20.000.**
Kendaraan	**66.000.**	**66.000.**	**66.000.**
Peralatan Kantor	**11.000.**	**18.000.**	**20.000.**
Peralatan percetakan	**26.000.**	**31.250.**	**33.500.**
Akumulasi Penyusutan	**- 59.437,500**	**- 71.437,500**	**- 94.453,125**
Jumlah Aktiva Tetap	**157.062,500**	**157.312,500**	**187.000.**
Total Aktiva	**293.540,827**	**333.145,705**	**374.535,455**
Pasiva			
Hutang Lancar			
Hutang Dagang	**35.221,968**	**34.010,500**	**33.459,400**
Hutang Bank	**16.394,768**	**16.784,271**	**15.961,485**
Hutang Pajak	**11.709,924**	**13.034,192**	**13.949,457**
Jumlah Hutang Lancar	**63.326,659**	**63.828,963**	**63.370,341**
Modal	**195.084,397**	**230.214,168**	**269.316,743**
Laba Operasi	**35.129,771**	**39.102,575**	**41.848,371**

Sumber data: diolah

Kenaikan neraca nilai kekayaan 2021 sebesar Rp. 293.540,827, 2022 Rp.333.145,705 dan 2023 mengalami kenaikan kekayaan sebesar Rp 374.535,455.

Tabel 4.4

CV. Rahmatika Laporan Harga Pokok Produksi

2021,2022 2023

(Dalam Ribuan)

Keterangan	2021		2022		2023	
Pemakaian Bahan Baku						
Persedian Awal	**5.000.**		**3.500.**		**6.000.**	
Pembelian	**20.800.**		**22.800.**		**25.200.**	
Biaya. Angkut	**500.**		**850.**		**1.000.**	
Retur Pembelian	**- 2.500.**		**- 1.600.**		**- 4.000.**	
Total Pembelian	**18.800.**		**22.050.**		**22.200.**	
Jml.Pembelian Bahan Baku Bersih	**23.800.**		**25.550.**		**28.200.**	
Persedian Bahan Baku Akhir	**- 3.500.**		**- 2.750.**		**- 3.500.**	
Jumlah Pemakaian Bahan Baku		**20.300.**		**22.800.**		**24.700.**
Gaji/upah Tenaga Kerja Langsung		**4.750.**		**4.750.**		**4.750.**
Biaya Overhead Pabrik						
Gaji pengawas Produksi	**2.000**		**2.000.**		**2.000.**	
Biaya. Pemeliharaan Mesin cetak	**2.450.**		**2.450.**		**3.000.**	
Biaya Perlengkapan Produksi	**3.000.**		**4.250.**		**5.000.**	
Biaya Penyusutan mecin percetakan 1	**1.750.**		**1.750.**		**1.750.**	
Biaya. Penyusutan Mesin percetakan 2	**2.000.**		**2.000.**		**2.500.**	
Jumlah Biaya Overhead Pabrik		**11.200.**		**12.450.**		**14.250.**
Jumlah Biaya Produksi		**36.250.**		**40.000.**		**43.700.**
Persedian dalam Proses Awal		**3.500.**		**6.000.**		**4.500.**
Jumlah Barang dalam Proses		**39.750.**		**46.000.**		**48.200.**

Sumber data diolah

Perhitungan biaya produksi dan PPN yang dibayarkan saat ini adalah sebagai berikut**:**

Tabel 4.5

CV RahmatikaPerhitungan Harga Pokok Produksi dan PPN yangTerhutang

2021, 2022 ,2023

(dlm ribuan)

Diskripsi	2021	2022	2023
Hasil Penjualan	56.000.	66.250.	75.000.
Harga Pokok Produksi A	37.000.	42.500.	47.200.
Harga Pokok Produksi B	38.109,244	43.915,984	48.665,672
PPN Masukan (tidak dapat diKreditkan)	1.109,244	1.415.984	1.465,672
PPN Masukan (dapat di Kreditkan)	770,756	789,017	754,328
PPN Keluaran atau Hutang PPN	5.600.	6.625.	7.500.
PPN Terhutang	4.829,244	5.835,984	6.745,672

Sumber: data diolah

Pada tabel diatas Harga Pokok Produksi A dan B ada selisih, yang dalam perhitungan biaya produksi A 2021 adalah Rp 37.000. serta di laporan harga pokok penjualan B Rp 38.109.244. dan rasio harga pokok penjualan B sebesar Rp.43.915.984. ada laporan harga pokok penjualan B sebesar Rp 4865.672 terdapat selisih sebesar Rp 1.465.672. Sebagai pembelian bahan baku, PPN masukan tidak bisa dikurangkan.

Berikutnya hitungan PPN dari yang terhungan di 2021 sebesar Rp 4.829,244. tahun 2022 PPN yang terhutang sebesar Rp 5.835,984 tahun 2023 sebesar Rp 6.745,672. Menurut ketentuan perpajakan, kredit pajak dapat diberikan apabila PPN masukan tergolong PPN tidak terkreditkan, PPN yang tidak bisa dikreditkan, antara lain karena faktur pajaknya adalah faktur pajak sederhana. Cara menggunakan barang/jasa kena pajak untuk keperluan pribadi. PPN keluaran yang tidak dapat dikurangkan memiliki persentase yakni:

Tabel 4.6

CV Rahmatika Persentase PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan

2021, 2022, 2023

(dlm ribuan)

Diskripsi	2021	2022	2023
Biaya (pembelian) bahan baku	18.800	22.050	22.200.000
Total pembelian bahan baku	18.800	22.050	22.200.000
PPN Masukan (seharusnya dari keseluruhan persediaan)	1.880	2.205	2.220.000
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)	1.109,244	,1.415,984	1.465.672
Presentase PPN Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan	"29,5%	"32,105%	"33.01%

Sumber : data diolah

Tabel tersebut menjelaskan bahwa 29,5% dari PPN yang tidak dapat dikurangkan yang dibayarkan pada tahun 2021, 32,105% pada tahun 2022 dan 33,010% pada tahun 2023 dapat dikurangkan. Selain itu, PPN yang tidak dapat dikurangkan diperlakukan sebagai harga pembelian bahan baku, yang mengurangi harga pembelian laba kotor. Persentase penurunan jumlah laba kotor cukup signifikan.

Tabel 4.7
CV Rahmatika Perbandingan Laba Kotor
2021,2022, 2023
(dlm ribuan)

Keterangan	Target		Realisasi	
	2021			
Hasil Penjualan	56.000.	50%	**56.000.**	**50%**
Harga Pokok Produksi (HPP)	37.000.	33%	**37.000.**	**33%**
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)		0%	**1.109,244**	**1%**
Laba Kotor	19.000.	177%	**17.890,756**	**16%**
	2022			
Hasil Penjualan	66.250.	50%	**66.250.**	**50%**
Harga Pokok Produksi (HPP)	42.500.	32%	**42.500.**	**32%**
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)		0%	**1.415,984**	**1%**
Laba Kotor	23.750.	18%	**22.334,017**	**17%**
	2023			
Hasil Penjualan	75.000.	50%	**75.000.**	**50%**
Harga Pokok Produksi (HPP)	47.200.	32%	**47.200.**	**32%**
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)		0%	**1.465,672**	**1%**
Laba Kotor	27.800.	19%	**26.334,328**	**18%**

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data pengolahan diatas, PPN masukkan yang tidak bisa di kreditkan ialah 1% dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target laba bruto tahun 2021 sebesar Rp19.000. sebesar Rp 17.880.758, maka pada tahun 2022 targetnya sebesar Rp 23.750. pada harga Rp. 22.334.017 dan pada tahun 2023 targetnya Rp. 27.800 sampai dengan Rp.

28.334.328 ternyata nilai laba kotor perusahaan mengalami penurunan. Persentase perkiraan penurunan akibat PPN masukan yang tidak bisa dikurangkan adalah pada table dibawah ini:

Tabel 4.8

CV Rahmatika Persentase Penurunan Nilai Laba Kotor

2021,2022, 2023

(dlm ribuan)

Diskripsi	2021	2022	2023
Laba Kotor yang Ditargetkan	19.000.	23.750.	27.800.
Laba Kotor yang Diperoleh	17.890,756	22.334,017	26.334,328
Penurunan Nilai Laba Kotor	1.109,244	1.415,984	1.465,672
Persentase Penurunan Nilai Laba Kotor	2,92%	2,98%	2.63%

Sumber : Data Diolah

Tabel di atas menunjukkan persentase penurunan laba kotor yang besar di tahun 2021 sebesar 2,92%, kemudian pada tahun 2022 sebesar 2,98%, dan pada tahun 2023 sebesar 2,63%.

Berdasarkan penelitian penerapan PPN berpengaruh pada laporan keuangan pada CV. Rahmatika didapatkan dengan hasil seperti dibawah ini :

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Pelaksanaan Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai UU no. 42 tahun 2009 dan PSAK no. 14 mengenai persediaan, Perusahaan menerapkan PPN pada faktur dengan menagihkan PPN sesuai dengan metode kredit, dan membebankan PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. dengan biaya produksi, yakni sebesar biaya pembelian inventaris.

Pengaruh PPN terhadap Penyajian Laporan Keuangan

Teori PPN mempunyai dampak yang besar pada laba kotor dalam laporan keuangan. Hal ini karena PPN masukan yang tidak dapat dikurangkan mengurangi laba kotor. Untuk mengantisipasi penurunan laba kotor, harga jual produk dinaikkan terlebih dahulu dan margin laba kotor yang dihasilkan disesuaikan untuk mempertahankan nilai yang ditargetkan. Sehingga, kenaikan harga saja sudah cukup untuk menutupi kerugian akibat PPN. Pemasukan tidak bisa diandalkan.

KESIMPULAN

Dengan menggunakan metode perhitungan kredit, PPN masukan diakui pada saat bahan baku dibeli dan PPN keluaran diakui pada saat produk dijual. PPN masukan kemudian ditambahkan ke PPN keluaran untuk menentukan jumlah PPN terutang. PPN masukan yang tidak dapat dimasukkan di PPN produksi dimasukkan ke harga pokok penjualan, yang memperhitungkan PPN masukan sebagai biaya pembelian/pembelian bahan.

Tentang Biaya PPN masukan tidak dapat dikreditkan pada biaya produksi, perlakuan ini berdampak mengurangi nilai laba kotor perusahaan.

SARAN

Pelaku usaha harus memastikan Pilih entitas yang ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memastikan bahwa PPN, khususnya PPN masukan, dicatat dengan benar sebagaimana mestinya, khususnya dalam bentuk faktur pajak, dan untuk memastikan integritas administrasi PPN. di jalan yang bisa menjadi beban jika tidak dapat dihindari, lebih baik mengantisipasinya dengan melakukan penyesuaian harga menjual dengan benar agar keuntungan yang diterima tetap sesuai dengan target**.**

DAFTAR PUSTAKA

Christina. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca. Jurusan Akuntansi. STIE MDP

Darmayanti, Novi. 2012. Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN).

Jurusan akuntansi. Universitas islam darul ulum lamongan

Direktorat Jendral Pajak, 2012, Kumpulan Undang- Undang Perpajakan Penerbit Kanwil DJP, Sulselbatra

Feldman, 2012, *Perpajakan Indonesia, Edisi Kedua*, Edisi Refisi 2011, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta

Gunandi, 2002, *pajak pertambahan nilai*, jakarta: PT. Multi Utama Indonesia Hanum, zulia. 2015. Peerapan akuntansi pajak pertambahan nilai

Harahap, Sofyan, 2011, *Teori akuntansi,* Edisi Refisi 2011, Penerbit Rajawali Perss Jakarta.

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Refisi 2011, Penerbi Andi, Yogyakarta Priantara, Diaz, 2012, *perpajakan indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

Prof Dr. Rocman Soemitro, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi,Yogyajarta

PSAK, Nomor 14 tentang persediaan (Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009), Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Siskawati, mey. 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Dan Penyajiannya Pada Laporan Keuangan. Jurnal riset mahasiswa akuntansi. Universitas Kanjuruhan Malang

Suprianto, Edy, 2011, *Akuntansi Perpajakan,* Penerbit Graha Ilmu, Yogjakarta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), revisi dari Undang-Undang No. 8/1983, Undang-Undang No. 11/1994, dan Undang-Undang No. 18/2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1945, 2012, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1985, 2010 Pokok-Pokok PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia, Penerbit PT. Raja Grafiando Persada, Jakarta.

Whaskita, Santi. 2013. Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai. Jurusan Akuntansi. Universitas Wijaya Putra